

UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

**Raras Risia Yogasnumurti¹, Muhammad Hafizh², Tsurayya Syarif Zain³,
Heni Yuvita⁴**

^{1,3,4} *Jurusan Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Sriwijaya, Indonesia*
² *Prodi Ekonomi Syariah, Universitas Malikussaleh, Indonesia*

✉ Corresponding Author:

Nama Penulis: Raras Risia Yogasnumurti

E-mail: raras.risia.yogasnumurti@polsri.ac.id

Abstract

Poverty is a problem in various countries around the world that makes their governments look for solutions to alleviate the ruins. In the Islamic economy there are tools that can deal with the problem of poverty, namely through the distribution of zakat and capital development through Islamic bank and non-bank financial institutions. South Sumatra has 97.17% of the population who adhere to the Muslim religion, it should be able to have a positive impact on alleviating poverty locally and nationally. The biggest thing that caused chaos to increase in South Sumatra was the occurrence of a comprehensive disaster in various countries, namely COVID 19 which changed new conditions where people had to be able to adapt. Distribution of zakat and business development through BMT is one way out to minimize this poverty.

Keywords: *Poverty, Islamic Financial Institutions, Zakat, Baitul Maal Tamwil (BMT)*

Abstrak

Kemiskinan yang menjadi permasalahan di berbagai negara seluruh dunia yang membuat pemerintahnya mencari solusi untuk melakukan pengentasan terhadap kemiskinan tersebut. Di ekonomi Islam ada alat yang dapat menangani masalah kemiskinan yaitu melalui penyaluran zakat dan pengembangan modal melalui lembaga keuangan syariah bank maupun nonbank. Sumatera Selatan memiliki 97,17% masyarakat yang menganut agama muslim, seharusnya bisa memberikan dampak positif untuk mengentaskan kemiskinan secara lokal maupun nasional. Hal terbesar yang menyebabkan kemiskinan meningkat di Sumatera Selatan adalah terjadinya bencana menyeluruh di berbagai negara yaitu COVID 19 yang merubah keadaan baru dimana masyarakat harus bisa menyesuaikan. Pendistribusian zakat dan pengembangan usaha melalui BMT merupakan salah satu jalan keluar untuk meminimalisir kemiskinan tersebut.

Kata Kunci : *Kemiskinan, Lembaga Keuangan Syariah, Zakat, Baitul Maal Tamwil (BMT)*

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan ekonomi sosial yang sangat kompleks untuk diatasi. Kemiskinan yang melanda di seluruh lapisan masyarakat dunia tak ayal menjadi deprivasi kesejahteraan terutama terjadi pada masyarakat di negara berkembang. Kemiskinan yang multidimensional diindikasikan dengan pendapatan rendah dan ketidakmampuan negara dalam mensuplai barang dan jasa untuk keberlangsungan hidup masyarakat setempat. Selain itu, kemiskinan juga diindikasikan dengan rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan, sistem sanitasi dan ketersediaan air bersih yang buruk, sistem keamanan yang kurang memadai, hingga tidak meratanya kebutuhan sandang, pangan, maupun papan (Chikwira & Vengesai, 2022).

Menurut World Bank, jika seseorang hidup dengan \$1,90 atau setara dengan Rp.30.000,- per hari atau kurang, maka dapat dikatakan orang tersebut hidup dalam kemiskinan ekstrim. Saat ini, diperkirakan 767 juta orang di dunia termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrim (ZIMSTAT 2020). Sementara Indonesia sebagai negara berkembang terus berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan. Berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2022, penduduk miskin Indonesia tercatat sebesar 9,54% dari jumlah penduduk atau setara dengan 26,16 juta orang. Meski demikian, persentase ini mengalami penurunan sebesar 0,17% dibandingkan September 2021. Adapun dasar penghitungan BPS yaitu menggunakan garis kemiskinan nasional berdasarkan pengeluaran, yakni sekitar Rp 550 ribu rupiah per kapita per bulan.

Berbagai macam upaya dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Salah satunya, pemerintah membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). TNP2K dibentuk untuk mendorong koordinasi antar lintas kementerian dan kelembagaan yang bertujuan untuk efektifitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat miskin dan rentan, dan untuk menurunkan angka ketimpangan pendapatan status ekonomi sosial (TNP2K.go.id). Eksistensi lembaga keuangan menjadi salah satu pendekatan untuk menanggulangi angka kemiskinan di Indonesia. Lembaga keuangan turut berperan aktif dalam meningkatkan program-program yang mendukung dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat miskin dan rentan. Salah satunya adalah lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga yang instrumennya menerapkan aturan sistem ekonomi Islam (Hariyanto & Nafi'ah, 2022).

Lembaga keuangan syariah memiliki instrument dan produk keuangan mikro yang dilandasi oleh nilai dan norma keuangan syariah bisa

dijadikan program dalam pengentasan kemiskinan melalui program pemberdayaan ekonomi. Terbukti pada bulan Juli 2020, nilai asset keuangan Syariah di Indoneisa mencapai lebih dari 1.600.000 Triliun, dimana angka ini mengalami kenaikan sebesar 20,61% dari tahun sebelumnya. Berdasarkan catatan *Global Islamic Economics*, nilai perdagangan masyarakat dunia di sektor syariah mencapai 3 triliun dolar AS atau setara Rp 45 ribu triliun pada 2023 mendatang (Opportunity, 2022). Hal ini menjadi potensi besar bagi Indonesia terutama bagi lembaga keuangan syariah di Indonesia untuk menjadi salah satu tombak industri syariah di dunia (KNEKS, 2022).

Terkait kemiskinan di Indonesia, Sumatera Selatan sebagai salah satu provinsi di Indonesia dengan penduduk provinsi yang berjumlah 8.550.849 jiwa, merupakan provinsi yang memiliki angka kemiskinan yang mencapai 11,90% dari jumlah penduduk di bulan Maret 2022. Meski demikian, jumlah kemiskinan di Sumatera Selatan mengalami penurunan dalam kurun waktu 1 tahun terakhir (Maret 2021-Maret 2022) sebesar 0,94% yang awalnya mencapai 12,84%. Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan (BPS Sumsel) menyebutkan bahwa terhitung sejumlah 1.044,69 ribu penduduk miskin yang tercatat di Sumatera Selatan. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2021 sebesar 12,36 persen turun menjadi 11,99 persen pada September 2021 dan turun menjadi 11,23 persen pada Maret 2022. Berdasarkan latar belakang permasalahan, peneliti bertujuan untuk menganalisis peran lembaga keuangan syariah untuk menurunkan angka kemiskinan di Sumatera Selatan.

KAJIAN PUSTAKA

Kemiskinan memiliki makna yaitu suatu permasalahan yang dihadapi oleh berbagai negara terutama di negara-negara yang sedang mengalami perkembangan. Salah satu indikator dalam mengatasi kemiskinan yaitu pertumbuhan ekonomi. Apabila sekelompok anggota masyarakat tidak dapat untuk memenuhi kebutuhan kehidupan yang paling utama, seperti pangan, pakaian dan tempat tinggal, maka dapat dikatakan berada di bawah garis kemiskinan (Hardinandar, 2019). Batas minimum pendapatan yang ditentukan oleh garis kemiskinan diperlukan untuk mencukupi kebutuhan pokok memiliki pengaruh-pengaruh yakni: 1) persepsi manusia terhadap kebutuhan yang dibutuhkan, 2) kedudukan manusia di sekitar lingkungan, 3) kebutuhan objektif manusia yang berguna untuk dapat menjalani kehidupan secara manusiawi. Keberhasilan pembangunan pemerintah pada daerah dapat

diukur melalui kesejahteraan masyarakatnya. Kemiskinan membuat adanya kesenjangan dengan beberapa kalangan.

Ada instrumen yang dapat dijadikan sebagai solusi untuk pengentasan kemiskinan yaitu melalui penyaluran zakat dari masyarakat yang mampu ke masyarakat yang tidak mampu secara finansialnya serta melakukan pengembangan usaha melalui Baitul Maal Tamwil (BMT). Zakat memiliki makna bahwa tumbuh atau meningkat, atau dengan kata lain zakat merupakan suatu kegiatan mendistribusikan kembali kekayaan yang dimiliki orang yang mampu kepada orang yang layak menerimanya. Zakat memiliki fungsi yang penting yaitu untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat yang telah diberikan dalam berbagai jenis bentuk bantuan hingga bantuan usaha bisa dimanfaatkan masyarakat dengan benar. Sehingga dapat dikembangkan lagi usaha tersebut dan dapat melakukan pembiayaan melalui lembaga keuangan syariah.

Lembaga keuangan syariah memiliki definisi sebagai lembaga keuangan yang secara operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah terhindar dari unsur maisyir, gharar dan riba. Lembaga keuangan syariah dapat dibedakan menjadi dua yaitu (Rodoni & Hamid, 2008):

1. Lembaga keuangan *depository* syariah (*depository financial institution syariah*) yang disebut dengan Lembaga keuangan bank syariah contohnya adalah Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS);
2. Lembaga keuangan syariah *non-depository* (*non depository financial institution syariah*) yang disebut lembaga keuangan syariah bukan bank, contohnya adalah pegadaian syariah, Baitul Maal wa Tamwil, koperasi syariah, asuransi syariah.

Lembaga keuangan mikro merupakan wadah bagi masyarakat yang belum bisa mengakses ke bank. Lembaga keuangan mikro ini salah satu contohnya adalah Baitul Maal Tamwil. Beberapa tahun terakhir ini BMT mulai hangat diperbincangkan. BMT telah tumbuh menjadi sebuah alternatif dalam memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia. Peran BMT untuk mengentaskan kemiskinan sudah mulai terasa jika BMT dan pengelolanya terus melakukan pembenahan yang lebih serius dalam pemberdayaan masyarakat.

Pada proses pemberdayaan ini, ditekankan untuk memberikan kemampuan kepada masyarakat akan menjadi lebih berdaya, mendukung atau melakukan dorongan kepada individu untuk memiliki keahlian dalam menentukan pilihan hidupnya. Habitiasi pada usaha pemberdayaan bisa ditujukan dalam sektor usahanya, melalui pemberian motivasi dan peluang usaha serta tertuju kepada masyarakat dengan memberikan pendidikan dan pelatihan untuk memulai usaha. Dengan BMT dapat menjadi intermediasi antar pengusaha kecil dengan bank melalui pemberian modal untuk

dikembangkan oleh masyarakat yang memiliki usaha ataupun yang ingin membangun usaha.

METODE

Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif. Penggunaan metode ini dipilih dengan alasan yaitu menggambarkan secara sistematis adanya fakta pada peranan lembaga keuangan syariah dalam meminimalisir kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan. Data dan informasi yang dikumpulkan adalah data sekunder yang didapatkan dari website Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan ada beberapa literatur yang diperoleh dari penelitian sebelumnya dan penulis yang lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan

Jumlah penduduk provinsi yang memiliki sebutan Bumi Sriwijaya ini sebanyak 8,49 juta jiwa. Dari angka tersebut, sejumlah 8,25 juta jiwa (97,17%) menganut agama Islam (Kusnandar, 2021). Jumlah tersebut merupakan yang terbanyak dibandingkan dengan pemeluk agama lainnya. Dengan kata lain, Islam adalah agama mayoritas yang dianut oleh penduduk di Sumatera Selatan.

Pemerintah Sumatera Selatan telah menerapkan kebijakan yang sesuai dengan Sustainable Development Goals (SDGs) yang merupakan kelanjutan dari Millenium Development Goals (MDGs) melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2019-2023. Pada RPJPD tahun 2019-2023 pemerintah Sumatera Selatan menyusun strategi menurunkannya kemiskinan dan pengangguran (Maju Kesejahteraan Masyarakat). Strategi yang telah dijabarkan dalam kebijakan tersebut berupa 1) Menekan tingkat kemiskinan guna memperkecil kesenjangan sosial melalui peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar dan kegiatan ekonomi produktif. 2) Mengendalikan harga kebutuhan pokok. 3) Menurunkan daerah rawan pangan. 4) Mengoptimalkan peran koordinasi dan konsultasi kemiskinan.

Kebijakan tersebut telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sehingga mengalami penurunan terhadap jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun. Tetapi, fakta di lapangannya terdapat tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Sumatera Selatan yaitu tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan selalu lebih tinggi dari angka nasional. Hal ini menunjukkan belum optimalnya upaya untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan, tingkat kemiskinan

Raras Risia Yogasnumurti, Muhammad Hafizh, Tsurayya Syarif Zain, Heni Yuvita: Upaya Pengentasan Kemiskinan Melalui Lembaga Keuangan Syariah Di Provinsi Sumatera Selatan

masih menjadi prioritas, dimana pengentasan kemiskinan harus didukung dalam dua strategi yaitu meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Adanya pengurangan jumlah penduduk miskin, maka terdapat pengaruh pada kegiatan lainnya seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan dan lain-lain.

Tabel 1.
Jumlah Penduduk Miskin Sumatera Selatan

Kabupaten/Kota dan Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Ogan Komering Ulu	46.34	45.71	46.84	47.30	47.50
Ogan Komering Ilir	127.06	124.86	124.14	123.34	124.78
Muara Enim	81.30	78.58	78.75	79.27	80.40
Lahat	67.33	65.31	65.03	65.75	68.40
Musi Rawas	55.96	54.75	53.82	54.95	57.46
Musi Banyuasin	105.08	105.15	105.83	105.38	105.23
Banyuasin	95.28	95.29	96.55	96.27	94.08
Ogan Komering Ulu Selatan	38.63	37.87	37.92	39.50	41.23
Ogan Komering Ulu Timur	72.81	70.65	70.40	71.10	72.89
Ogan Ilir	56.85	55.87	57.06	57.97	60.50
Empat Lawang	30.29	30.20	30.68	31.89	34.11
Penungkal Abab					
Lematang Ilir	26.75	25.78	25.47	24.17	25.10
Musi Rawas Utara	36.46	36.19	36.63	37.75	39.50
Palembang	184.41	179.32	180.67	182.61	194.12
Prabumulih	20.72	20.95	21.62	21.83	23.60
Pagar Alam	12.12	12.07	12.37	12.71	13.27
Lubuk Linggau	29.54	29.74	29.98	29.80	31.61
Sumatera Selatan	1086.92	1068.27	1073.74	1081.59	1113.76

Sumber: data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 1. Bahwasanya, kabupaten/kota yang paling tinggi tingkat kemiskinannya di tahun 2021 adalah kota Palembang dengan angka 194,12 ribu. Dari tahun 2017 ke 2018 mengalami penurunan yang

Raras Risia Yogasnumurti, Muhammad Hafizh, Tsurayya Syarif Zain, Heni Yuvita: Upaya
Pengentasan Kemiskinan Melalui Lembaga Keuangan Syariah Di Provinsi Sumatera Selatan

menggambarkan bahwa pemerintah Sumatera Selatan fokus yang besar dalam mengurangi jumlah kemiskinan, tetapi pada tahun 2019 hingga 2021 mengalami kenaikan. Kenaikan ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu adanya kenaikan harga komoditas pangan dan non pangan, upah minimum yang tidak memadai dan adanya bencana dunia yaitu COVID-19 sehingga banyak tenaga kerja yang di putus kontrak, sehingga meningkatnya jumlah pengangguran. Kemiskinan ini sudah ditangani oleh pemerintah, hanya saja masyarakat juga berkontribusi dan bertanggungjawab untuk memberikan bantuan dalam pengentasannya. Agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Sumatera Selatan adalah Islam, yang mana agama ini telah mempunyai alat untuk mengentas masalah kemiskinan yaitu melalui zakat yang dijadikan sebagai jaminan sosial.

Pengurangan Kemiskinan melalui Zakat

Cara untuk mengatasi kemiskinan dapat dengan beberapa strategi dan langkah-langkah. Yang harus dilakukan pada awal kali untuk mengatasi kemiskinan yang terjadi di masyarakat adalah dengan cara menerapkan tatanan ekonomi yang berdasarkan sistem distribusi yang adil, mendukung lahirnya kepedulian orang yang memiliki kemampuan secara keuangan terhadap kaum yang fakir, miskin, *dhu'afa* dan *mustadh'afin*. Salah satu bentuk kepedulian ini adalah memberikan zakat atau dengan kata lain bersedia untuk membayarkan zakat. Zakat adalah mengeluarkan infaq bagian dari harta yang bersifat wajib. Zakat juga memiliki fungsi yang sangat ideal dalam pandangan sistem ekonomi yaitu salah satu alat untuk mendistribusikan kekayaan.

Di masa sekarang ini, pendistribusian zakat telah terjadi perubahan, zakat dianggap hanya sebagai ritual ibadah saja, sehingga adanya terjadi kesalahan fungsi terhadap zakat. Bahkan bersifat sebagai kewajiban dan tidak ada rasa empati serta solidaritas terhadap sesama. Hal tersebut dapat berdampak pada keberlangsungan zakat yang lambat laun berubah menjadi kegiatan yang bersifat sementara yaitu pada waktu yang sama dengan zakat fitrah.

Secara moral, zakat dapat mengikis habis ketamakan dan keserakahannya orang-orang kaya, dapat menyucikan sifat kikir dari jiwa masyarakat yang menunuhnya. Di bidang sosial, kalangan orang miskin dapat berperan dalam kehidupannya untuk melaksanakan kewajibannya kepada Allah atas uluran zakat yang diberikan oleh kalangan kaum yang mampu atau kaya. Melalui zakat, orang yang

Raras Risia Yogasnumurti, Muhammad Hafizh, Tsurayya Syarif Zain, Heni Yuvita: Upaya Pengentasan Kemiskinan Melalui Lembaga Keuangan Syariah Di Provinsi Sumatera Selatan

tidak mampu dapat merasakan bahwa mereka adalah bagian dari masyarakat juga sehingga tidak disia-siakan atau diremehkan. Di bidang ekonomi, zakat dapat menjadi peran dalam mencegah penimbunan kekayaan pada beberapa kalangan saja dan hartanya dapat didistribusikan kepada kaum yang tidak mampu. Dari itulah zakat juga memiliki fungsi sebagai sumber dana yang sangat memiliki potensi untuk mengentaskan kemiskinan. Selain itu juga sebagai modal kerja bagi orang yang tidak mampu untuk membuka lapangan kerja, kemudian mendapatkan penghasilan serta memenuhi kebutuhan primernya.

Masyarakat di Sumatera Selatan memiliki beberapa metode penyerahan zakat diantaranya adalah ada yang melalui Badan Amil Masjid/Mushollah (diberikan pengelola masjid/mushollah langsung kepada delapan ashnaf, jika adanya uang sisa akan dikembalikan untuk pembangunan masjid/mushollah), ada yang langsung memberikan secara individu kepada yang dianggap berhak menerima zakatnya, ada juga yang memberikan melalui BAZNAS. Selain itu ada beberapa daerah di Sumatera Selatan seperti salah satunya Kabupaten Muara Enim yang memberikan zakatnya berbentuk bantuan fisik (gerobak sayur, lapak tempat penjualan kaki lima, dan barang-barang modal usaha) serta bantuan langsung berupa uang tunai.

Di tahun 2021 BAZNAS telah menetapkan 27 Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang dituangkan dalam naskah Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT), salah satu indikatornya adalah "Fakir Miskin yang dikeluarkan dari Garis Kemiskinan", target 2021 sebanyak 12.489 orang tetapi realisasinya lebih tinggi sebanyak 28.859 dengan capaian 231,1%. Hal ini menyatakan bahwa zakat mampu mengurangi jumlah kemiskinan yang ada di Sumatera Selatan. Pemerintah terus melakukan sosialisasi terhadap masyarakat untuk menyalurkan dana zakat kepada lembaga berbadan hukum seperti BAZNAS, karena lebih terukur dalam melihat dampaknya terhadap perekonomian secara menyeluruh untuk kabupaten/kota.

Pengurangan Kemiskinan melalui Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga yang mempunyai kekuatan Islam dimana dalam memberikan pelayanan maupun produk-produk yang ditawarkan, segala kegiatan diawasi oleh lembaga yang lebih tinggi yang disebut sebagai Dewan Pengawasan Syariah. Dengan kata lain, lembaga keuangan syariah mencakup semua aspek keuangan baik mengenai dunia perbankan, kerjasama dalam pembiayaan, keamanan dan asuransi

perusahaan dan lainnya yang menyangkut di luar konteks perbankan (Mensari & Dzikra, 2017).

Manfaat lembaga keuangan syariah yaitu untuk mendapatkan uang tunai sehingga tidak akan ada kecemasan atas kurangnya persediaan uang tunai yang beredar di kalangan masyarakat (Awwalunnisa, 2021). Prinsip operasional lembaga keuangan syariah yaitu: 1) Bebas MAGHRIB (Maysir, Gharar, Haram, Riba dan Bathil). 2) Menjalankan bisnis dengan memperoleh keuntungan yang sah menurut syariah. 3) Menyalurkan ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) (Mensari & Dzikra, 2017).

Kemiskinan dapat berkurang melalui lembaga keuangan syariah, karena tidak berbasis hutang, hal ini tidak akan menarik para masyarakat atau nasabah ke dalam situasi yang lebih keruh. Ajaran Islam juga mendorong pembebasan hutang apabila nasabah tersebut sedang berada pada titik masalah besar (Hasan, 2017). Sesuai dengan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah yaitu selalu berusaha dalam menyalurkan dana kepada pihak yang merasakan kekurangan dana, sehingga kegiatan tersebut dapat berguna dalam mengurangi bahkan mengentaskan kemiskinan dengan zakat dan menggunakan produk-produk di lembaga keuangan tersebut. Dapat dijadikan contoh situasi pasca pandemi Covid-19 yang memberikan dampak negatif terhadap pemasukan perekonomian masyarakat Sumatera Selatan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga mengakibatkan kenaikan angka pengangguran dan kemiskinan.

Selain itu, masyarakat Sumatera Selatan lebih tertarik pada lembaga keuangan konvensional dibandingkan lembaga keuangan syariah. Hal ini menjadikan keterbatasan dan masih minimnya kesadaran masyarakat Sumatera Selatan terhadap lembaga keuangan syariah. Secara administrasi, lembaga keuangan syariah memiliki kesan yang mempersulit dan ribet sehingga kurang menarik perhatian masyarakat. Padahal apabila dilihat dari sisi perkembangan ekonomi terutama bagi pelaku-pelaku usaha mikro, lembaga keuangan syariah sangat diperlukan dalam memperluas pasar sehingga dapat memberikan banyak kontribusi dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat maka dapat mensejahterakan juga sebagai bentuk upaya pemberantasan kemiskinan.

Kemiskinan bukan hanya diselesaikan oleh pihak pemerintah, melainkan menjadi tanggungjawab bersama, yaitu pemerintah, swasta, perguruan tinggi serta masyarakat itu sendiri. Akan banyak dampak negatif yang perlu ditangani jika permasalahan kemiskinan tidak dilakukan upaya atau ditanggulangi. Dampaknya adalah kecemburuan sosial, kerentanan, pengangguran, kriminalitas dan berbagai dampak lainnya. Salah satu tindakan

penanggulangan kemiskinan adalah memutuskan mata rantai kemiskinan melalui kesadaran masyarakat dan salah satunya melalui BMT (Baitul Mat wat Tamwil) (Amri, 2018)

Secara sosiologis, Baitul Maal Wa at-Tamwil atau BMT sering disebut sebagai koperasi syariah di Indonesia. Dikarenakan pada realitanya koperasi syariah banyak yang berasal dari konversi Baitul Maal Wa at-Tamwil (Redaksi, 2020). Amiruddin selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Selatan mengatakan bahwa jumlah koperasi berbasis syariah di Sumatera Selatan masih sangat minim. Terdapat 8.600 koperasi yang terdaftar, tetapi hanya 178 koperasi yang berbasis syariah. Hal tersebut terjadi dikarenakan kurangnya pemahaman warga Sumatera Selatan tentang ekonomi syariah. Masih banyak yang berasumsi bahwa koperasi syariah tidak modern dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Mereka juga belum banyak mengetahui bagaimana melakukan transaksi di koperasi syariah (Jati, 2022).

Tingkat kemiskinan akan lebih mengecil jumlahnya apabila perkembangan BMT di Sumatera Selatan lebih didukung lagi. Hal ini dapat memberikan modal usaha agar usaha masyarakat dapat berjalan dengan baik, selain itu dapat mengurangi jumlah pengangguran yang menyebabkan angka kemiskinan juga akan berkurang. Dengan memiliki usaha maka daya beli terhadap suatu barang pada masyarakat juga akan meningkat. Sangat banyak sekali manfaat dari keberadaannya BMT, dikarenakan banyaknya persaingan dengan bank syariah yang sudah mulai mengeluarkan program mengenai sektor mikro yang dapat memberikan bantuan kepada nasabah. Maka dari itu sangat dibutuhkan pengembangan diri yang dilakukan oleh BMT secara inovatif dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada para nasabah BMT serta pemerintah dapat mendukung sarana dan prasarana untuk membuat BMT menjadi lebih baik. Semakin banyak BMT yang akan membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan maka akan semakin banyak masyarakat di Sumatera Selatan yang sejahtera dan menjadi wilayah yang memiliki angka kemiskinan terendah di Indonesia.

KESIMPULAN

Angka kemiskinan di Sumatera Selatan pada tahun 2019 sampai 2021 mengalami peningkatan. Dikarenakan banyak hal salah satunya meningkatnya harga bahan pangan dan nonpangan serta adanya bencana COVID-19 yang mengakibatkan banyaknya pengangguran. Pengelolaan dan pemberdayaan zakat yang baik dan bijak akan sangat berguna bagi pengentasan kemiskinan di Sumatera Selatan, hanya saja masyarakatnya juga harus bisa bangkit dari keterpurukan kemiskinannya, tidak hanya mengharapkan adanya bantuan

Raras Risia Yogasnumurti, Muhammad Hafizh, Tsurayya Syarif Zain, Heni Yuvita: Upaya Pengentasan Kemiskinan Melalui Lembaga Keuangan Syariah Di Provinsi Sumatera Selatan

dari pemerintah ataupun zakat saja, melainkan harus berusaha dalam mengembangkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Sehingga dapat mengembangkan usaha tersebut dengan menggunakan jasa dari BMT yang ada di sekitar wilayah masyarakat Sumatera Selatan. Kerjasama antara masyarakat dan pemerintahlah yang akan menjadikan kemiskinan tersebut berkurang dan bahkan hilang di Sumatera Selatan. Pemerintah telah mewadahnya maka masyarakat pula yang harus memanfaatkan serta mengembangkan modal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, H. (2018). Membangun Kesadaran Masyarakat Pinggiran melalui Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). *Islamic Banking*, 11-22.
- Awwalunnisa, N. (2021). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Iqtishaduna*, 29-47.
- Chikwira, C., & Vengesai, E. (2022). The Impact of Microfinance Institutions on Poverty Alleviation.
- Hardinandar, F. (2019). Determinan Kemiskinan (Studi Kasus 29 Kota/Kabupaten di Provinsi Papua). *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4 (1), 1-12.
- Hasan, H. A. (2017). Pengentasan Kemiskinan dengan Keuangan Mikro Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1 No.1, 50-63.
- Ilmiah, J., & Islam, E. (2022). Pengaruh Aktivitas Lembaga Keuangan Syariah terhadap Pertumbuhan Pembiayaan UMKM. *8(01)*, 945–954.
- Jati, R. P. (2022, Maret 1). Koperasi Berbasis Syariah di Sumsel Masih Minim. Dipetik Januari 6, 2023, dari https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/03/01/koperasi-berbasis-syariah-di-sumsel-masih-minim?status=sukses_login&status_login=login.
- KNEKS. (2022). Rapat Pleno Komite Nasional Keuangan Syariah: Wujudkan Indonesia Menjadi Produsen Halal Terkemuka di Dunia. Diakses dari <https://kneks.go.id/berita/516/rapat-pleno-kneks-wujudkan-indonesia-menjadi-produsen-halal-terkemuka-di-dunia?category=3>
- Kusnandar, V. B. (2021, 09 25). Jumlah Penduduk Sumatera Selatan Menurut Agama/Kepercayaan (Jun 2021). Dipetik 01 05, 2023, dari [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/25/sebanyak-97-penduduk-sumatera-selatan-beragama-islam-pada-juni-2021#:~:text=Berdasarkan%20data%20Direktorat%20Jenderal%20Dinas,97%2C17%25\)%20beragama%20Islam](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/25/sebanyak-97-penduduk-sumatera-selatan-beragama-islam-pada-juni-2021#:~:text=Berdasarkan%20data%20Direktorat%20Jenderal%20Dinas,97%2C17%25)%20beragama%20Islam).

Raras Risia Yogasnumurti, Muhammad Hafizh, Tsurayya Syarif Zain, Heni Yuvita: Upaya Pengentasan Kemiskinan Melalui Lembaga Keuangan Syariah Di Provinsi Sumatera Selatan

Mensari, R. D., & Dzikra, A. (2017). Islam dan Lembaga Keuangan Syariah. *Al-Intaj*, 3 (1), 247.

Opportunity, U. (2022). State of the Global Islamic Economy Report. DinarStandard (Growth Strategy Research & Advisory): Dubai

Redaksi. (2020, Februari 3). Hukum Ekonomi Syariah dalam Kajian Teori (Koperasi Syariah). Dipetik Januari 7, 2023, dari <https://mentreng.com/hukum-ekonomi-syariah-dalam-kajian-teori-koperasi-syariah/>.

Rodoni, A., & Hamid, A. (2008). Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Zikrul Hakim.